SOHO Global Health

Jakarta, 19 Februari 2026/*19 February 2026*

No. : 160/SOHO-OJK/II/2026
Lampiran/*Attachment* : 3 rangkap/ 3 *set*

Perihal/ *Subject* : Tambahan Keterbukaan Informasi terkait Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali Perseroan yakni, PT. Parit Padang Global ("**PPG**")/ *Additional Disclosure of Information in relation Addition of Business Activities of the Company's Controlled Entity, namely PT Parit Padang Global ("PPG")*

Kepada/*To*:.

(i) Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
u.p./*attn.* : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ *Chief Executive of Capital Market Supervision*

(ii) PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 6
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
u.p./*attn.* : Direktur Penilaian Perusahaan/ *Director of Company Appraisal*

Dengan hormat,

Untuk menindaklanjuti Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-2/PM.212/2026 tanggal 26 Januari 2026 serta dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi mengenai Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali Perseroan yakni, PT PPG sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Surat ini.

Demikian keterbukaan informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Dear Messrs,

To follow up on the Financial Services Authority Letter No. S-2/PM.212/2026 dated 26 January 2026 and In order to comply with the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, the Company hereby discloses information regarding the Addition of business activities of the Company's Controlled Subsidiary, namely PT PPG, as further described in the Appendix to this Letter.

Thus, the disclosure of information that we can provide. Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ *Sincerely*,
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK



Yuliana
Direktur (*Director*)/ Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

PT. SOHO Global Health Tbk.
Jl. Rawa Sumur II Kav. B.B3
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930 INDONESIA

T. +6221 4683 4411
F. +6221 4683 4422, 4683 0505 (marketing)
www.sohoglobalhealth.com

TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN TERKENDALI PERSEROAN

PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Bidang Usaha
Kesehatan/ Industri Farmasi
Kegiatan Usaha
Aktivitas perusahaan holding; Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kantor Pusat
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930, Indonesia
Telepon: +62 21 4683 2588
Faksimile: +62 21 4683 2589
Alamat Email: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Website: www.sohoglobalhealth.com

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam tambahan keterbukaan informasi ini ("**Tambahan Keterbukaan Informasi**") dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang diungkapkan dalam Tambahan Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan, sehingga menyebabkan informasi sebagaimana diungkapkan dalam Tambahan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Penambahan atas Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan, agar Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lebih lengkap mengenai transaksi terkait rencana perubahan dan atau penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT Parit Padang Global yang merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan, berupa penambahan kegiatan usaha. Penambahan Keterbukaan Informasi ini disampaikan sehubungan dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-2/PM.212/2026 tanggal 26 Januari 2026 dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Penambahan atas Keterbukaan Informasi ini merupakan tambahan atas Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2026.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2026

I. PENDAHULUAN

Penambahan Keterbukaan Informasi ini disusun dalam rangka penambahan dan klarifikasi substansi atas Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2026 serta pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai perubahan dan atau penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh perusahaan terkendali Perseroan yakni, PT Parit Padang Global ("**PPG**"). Perubahan dan atau penambahan kegiatan usaha yang mana sebelum PPG dapat melaksanakan Transaksi tersebut, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan.

II. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN DAN PT PARIT PADANG GLOBAL

1. PT Soho Global Health Tbk ("Perseroan")

Keterangan Umum Perseroan

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang berstatus perusahaan terbuka , berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan pada tahun 1956 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Perseroan Dagang dan Industri Pharmasi Parit Padang atau disingkat PT Parit Padang berdasarkan Akta Pendirian No. 116 tanggal 27 Agustus 1956, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/16/14 tanggal 8 Februari 1957, telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 377 tanggal 16 Februari 1957, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 39 tanggal 14 Mei 1957, Tambahan No. 517.

Pada tahun 2010, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Soho Global Health berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 29 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54235.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") No. AHU-0083819.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31225 tanggal 6 Desember 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0088241.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan No. 13396 dan BNRI No. 59 tanggal 24 Juli 2012, Tambahan No. 1903/L.

Pada tahun 2020, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Soho Global Health Tbk serta menyesuaikan seluruh ketentuan anggaran dasarnya yang mana hal ini dilakukan untuk tunduk pada ketentuan yang berlaku terkait dengan perubahan status Perseroan dari

perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik. Perubahan tersebut tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 19 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dengan 2 (dua) Suratnya No. AHU-AH.01.03-0255808 dan No. AHU-AH.01.03-0255815 keduanya tertanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 176 tanggal 26 Oktober 2020, tambahan 13478. Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana pada tanggal 8 September 2020.

Perubahan terakhir pada Anggaran Dasar Perseroan dicatat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 175 tanggal 19 Oktober 2023, dibuat dihadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kemenkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.03-0134270 tanggal 27 Oktober 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 10 November 2023, tambahan 35319, yang mengatur perubahan struktur permodalan Perseroan. Sementara itu, jajaran direksi Perseroan terakhir diubah dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 102 tanggal 16 September 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kemenkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.09-0344487 tanggal 30 September 2025.

Mengacu pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dihadapan oleh Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah sebagai berikut (mengacu pada KBLI 2020):

a) Aktivitas perusahaan holding (KBLI 2020 - 64200)
   Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.
b) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 2020 - 70209)

   Mencakup kegiatan penyediaan nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan organisasi lain pada berbagai persoalan manajemen, penyediaan jasa bisnis ini dapat mencakup nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan layanan masyarakat atau umum pada berbagai aspek manajemen dan operasional. Subgolongan ini juga mencakup penyediaan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan yang berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran;

perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (public relations) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yakni jumlah saham dalam portepel, serta menambahkan informasi mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh, serta saham dalam portepel dalam tabel berikut disusun mengacu pada: (i) Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 175, tanggal 19 Oktober 2023, dibuat dihadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kemenkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.03-0134270 tanggal 27 Oktober 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 10 November 2023, tambahan 35319; dan Daftar Pemegang Saham (DPS) bulanan Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom per 31 Januari 2026, adalah sebagai berikut:

❖ **Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan**

Keterangan	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	28.635.121.560	1.431.756.078.000	
Cascade Creek Pty Ltd	1.537.362.000	76.868.100.000	12,113
Fraburg Pty Limited	1.201.822.210	60.091.110.500	9,469
Medisia Investment Holdings Pte. Ltd.	2.851.733.000	142.586.650.000	22,469
Tan Giok Nio	1.143.986.170	57.199.308.500	9,014
Tiberias 96 Pty Ltd	4.812.370.310	240.618.515.500	37,918
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.143.807.000	57.190.350.000	9,012
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.691.682.390	634.584.119.500	100,00
Saham Dalam Portepel	15.943.439.170	797.171.958.500	-

- Nilai Nominal
  Masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

❖ **Pengendali Perseroan**

Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, maka pihak yang merupakan Pengendali Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	Kepemilikan (%)
Cascade Creek Pty Ltd	1.537.362.000	76.868.100.000	12,113
Tiberias 96 Pty Ltd	4.812.370.310	240.618.515.500	37,918

Informasi ini juga senantiasa Perseroan umumkan setiap bulannya kepada Publik dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek.

❖ **Pemilik Manfaat Akhir Perseroan**

Nama individu Pemilik Manfaat Akhir Perseroan adalah Bapak Eng Liang Tan.
Informasi ini juga senantiasa Perseroan umumkan setiap bulannya kepada Publik dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek melalui Sistem Pelaporan Elektronik.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 102 tanggal 16 September 2025 yang datanya telah diterima dan dicatat di dalam SABH Kemenkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.09-0344487 tanggal 30 September 2025, maka Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Eng Liang Tan
Komisaris Independen : Harry Salam
Komisaris : Andy Nugroho Purwohardono

Direksi

Presiden Direktur : Ery Yunasri
Direktur : Piero Brambati
Direktur : Yuliana
Direktur : Richard Kidarsa
Direktur : Lim Chern Han
Direktur : Pandy Harianto

Laporan Keuangan Grup Perseroan

Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sampai dengan 2024 dan Laporan Keuangan Auditan Interim untuk untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

Dalam jutaan Rupiah	31 Desember					30 September 2025
Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain						
Pendapatan	6.163.939	7.076.164	7.290.121	8.197.755	10.057.938	7.924.506
Laba Kotor	1.346.313	1.569.353	1.338.391	1.309.356	1.540.838	1.309.082
Laba Usaha	259.843	677.289	443.659	438.670	571.247	548.422
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	249.674	691.157	455.637	463.396	588.038	563.299
Laba Bersih	172.200	551.091	357.015	371.341	462.651	440.092
Laba Komprehensif	164.806	553.710	372.904	371.331	468.418	432.604

Sumber: Laporan Keuangan Auditan Konsolidasian Grup SOHO per 31 Desember 2020-2024 dan Laporan Keuangan Auditan Interim 30 September 2025

Dalam jutaan Rupiah	31 Desember					30 September 2025
Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024	
Laporan Posisi Keuangan						
Aset lancar	3.405.989	3.341.171	3.873.438	4.140.019	4.749.357	5.354.074
Aset tidak lancar	774.254	680.748	601.161	606.941	662.666	660.859
Jumlah Aset	**4.180.243**	**4.021.919**	**4.474.599**	**4.746.960**	**5.412.023**	**6.014.933**
Liabilitas jangka pendek	1.797.440	1.654.049	1.898.934	2.186.112	2.526.572	2.979.043
Liabilitas jangka panjang	176.701	159.579	148.110	161.750	170.235	188.862
Jumlah Liabilitas	**1.974.141**	**1.813.628**	**2.047.044**	**2.347.862**	**2.696.807**	**3.167.906**
Jumlah Ekuitas	**2.206.102**	**2.208.291**	**2.427.555**	**2.399.098**	**2.715.216**	**2.847.027**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**4.180.243**	**4.021.919**	**4.474.599**	**4.746.960**	**5.412.023**	**6.014.933**

Sumber: Laporan Keuangan Auditan Konsolidasian Grup SOHO per 31 Desember 2020-2024 dan Laporan Keuangan Auditan Interim 30 September 2025

Dalam jutaan Rupiah	31 Desember					30 September 2025
Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024	
Marjin Laba Kotor	21,84%	22,18%	18,36%	15,97%	15,32%	16,52%
Marjin Laba Usaha	4,22%	9,58%	6,09%	5,35%	5,68%	6,55%
Marjin Laba Bersih	2,79%	7,79%	4,90%	4,53%	4,60%	5,55%
Imbalan Balik Aset	4,12%	13,70%	7,98%	7,82%	8,55%	7,32%
Imbalan Balik Ekuitas	7,81%	24,96%	14,71%	15,48%	17,04%	15,46%
Rasio Lancar	1,89	2,02	2,04	1,89	1,88	1,80
Rasio Cepat	1,31	1,34	1,44	1,26	1,24	1,29

2. PT Parit Padang Global ("PPG")

Keterangan Umum PPG

PPG merupakan perusahaan tertutup, berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan dengan nama PT Parit Padang Global berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-42317.AH.01.01 tanggal 28 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 66 tanggal 16 Agustus 2010, Tambahan No. 11835.

PT PPG merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dimana Perseroan memiliki 99,9999% saham langsung di PPG. Laporan Keuangan PPG juga dikonsolidasikan dengan Perseroan.

Anggaran Dasar PT PPG yang dimuat dalam Akta Pendirian PPG telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PPG No. 174 tanggal 26 Agustus 2025, dibuat dihadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kemenkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.09-0334846 tanggal 8 September 2025.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 42 tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta bidang usaha yang dijalankan oleh PPG saat ini adalah sebagai berikut:

a. Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan (KBLI 2020 – 46321)
   Mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.
b. Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan (KBLI 2020 – 46322)
   Mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.
c. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 2020 – 46324)
   Mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
d. Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur (KBLI 2020 – 46325)
   Mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
e. Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (KBLI 2020 – 46326)
   Mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.
f. Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani (KBLI 2020 – 46327)
   Mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani.
g. Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula (KBLI 2020 – 46331)
   Mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan pemanis.
h. Perdagangan Besar Produk Roti (KBLI 2020 – 46332)
   Mencakup usaha perdagangan besar produk roti, kue dan bakeri lainnya.
i. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 2020 – 46334)
   Mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.
j. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (KBLI 2020 – 46339)

Mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

k. Perdagangan Besar Pakaian (KBLI 2020 – 46412)
Mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.

l. Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik (KBLI 2020 – 46430)
Mencakup usaha perdagangan besar alat fotografi dan barang optik (seperti kaca mata, teropong dan kaca pembesar).

m. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan - Rumah Tangga (KBLI 2020 – 46491)
Mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainnya.

n. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (KBLI 2020 – 46441)
Mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia.

o. Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan (KBLI 2020 – 46447)
Mencakup usaha perdagangan besar bahan baku farmasi baik untuk manusia maupun hewan.

p. Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI 2020 – 46442)
Mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia.

q. Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan (KBLI 2020 – 46448)
Mencakup usaha perdagangan besar bahan baku obat tradisional baik untuk manusia maupun hewan.

r. Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 2020 – 46443)
Mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

s. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (KBLI 2020 – 46449)
Mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.

t. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI 2020 – 46691)
   Mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
u. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (KBLI 2020 – 46699)
   Mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
v. Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI 2020 – 52101)
   Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil
w. Aktivitas *Cold Storage* (KBLI 2020 – 52102)
   Mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).
x. Aktivitas *Bounded Warehousing* Atau Wilayah Kawasan Berikat (KBLI 2020 – 52103)
   Mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.
y. Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya (KBLI 2020 – 52109)

   Mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PPG

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PPG berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PPG Nomor 287, tanggal 29 Desember 2023, dibuat dihadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.03-0012934 tanggal 16 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

- **Struktur Permodalan**
  - Modal Dasar

    Jumlah Saham: 884 lembar
    (terdiri dari 259.000 lembar saham Seri A dan 625.000 lembar saham Seri B)
    Jumlah Nominal: Rp 1.366.065.625.000,-

  - Modal Ditempatkan dan Disetor

    Jumlah Saham: 884 lembar
    (terdiri dari 259.000 lembar saham Seri A dan 625.000 lembar saham Seri B)
    Jumlah Nominal: Rp 1.366.065.625.000,-

- Nilai Nominal
  Saham Seri A: Memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- per saham
  Saham Seri B: Memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.771.305,- per saham

❖ **Susunan Pemegang Saham PPG**

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	Kepemilikan (%)
PT Soho Global Health Tbk	883.999 lembar saham (terdiri dari 258.999 lembar saham Seri A dan 625.000 lembar saham Seri B)	1.366.064.625.000	99,9999
PT Universal Health Network	1 lembar saham Seri A	1.000.000	0,0001

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPG

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PPG Nomor 174 tanggal 26 Agustus 2025 yang datanya telah diterima dan dicatat di dalam SABH Kemenkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.09-0334848 tanggal 8 September 2025, maka Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPG pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Eng Liang Tan

Direksi
Presiden Direktur : Ery Yunasri
Direktur : Piero Brambati
Direktur : Edwin Vega Darma
Direktur : Pandy Harianto

III. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

PPG telah menunjuk Bapak Budi Prasetyo MAPPI (Cert), seorang penilai independen yang merupakan salah satu Penilai Publik pada Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika & Rekan ("**KJPP-WJR**"), yang mana Penilai Publik dan KJPP-WJR dimaksud telah memiliki perizinan dan terdaftar sebagai Penilai di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan izin usaha No. 2.15.0133 dan Otoritas Jasa Keuangan dengan STTD No. STTD.PB-55/PM.223/2022. Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Perikatan No. P2295/BV25/012-KJPP/11-25 tanggal 28 November 2025 mengenai Jasa Studi Kelayakan Bisnis PT Parit Padang Global.

Berikut adalah ringkasan laporan studi kelayakan atas Perubahan dan atau penambahan Kegiatan Usaha PT PPG sebagaimana dituangkan dalam Laporan Studi Kelayakan Bisnis PT PPG dengan No. 00003/2.0133-00/BS/05/0603/1/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 sebagaimana telah direvisi lebih lanjut dalam Laporan Studi Kelayakan Bisnis PT Soho Global Health Tbk dengan No. 00008/2.0133-00/BS/05/0603/1/II/2026 tanggal 19 Februari 2026 ("**Laporan Studi Kelayakan Bisnis**"):

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan Studi Kelayakan Bisnis ini adalah terkait rencana PPG untuk melakukan penambahan kegiatan usaha berupa 2 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ke dalam Anggaran Dasar PPG. Studi Kelayakan Usaha ini juga ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 ("POJK 17") tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

B. TANGGAL LAPORAN PENILAIAN

Tanggal penilaian terkait Studi Kelayakan Bisnis adalah 30 September 2025.

C. OBJEK STUDI KELAYAKAN BISNIS

Objek studi kelayakan bisnis adalah rencana PT PPG untuk melakukan penambahan kegiatan usaha baru berupa 2 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) dengan mengacu pada KBLI 2020 ke dalam Anggaran Dasar (dengan mengacu pada KBLI 2020) PT PPG dengan rincian sebagai berikut ("**Rencana Transaksi**"):

PT Parit Padang Global hendak melakukan Penambahan KBLI karena diperlukan sehubungan dengan kebutuhan pembaruan Nomor Induk Berusaha PT Parit Padang Global dalam kaitannya dengan aplikasi PPGOS. Hal ini menjadi keharusan bagi PT Parit Padang Global akibat regulasi baru dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang mewajibkan PT Parit Padang Global untuk mengajukan izin Cara Distribusi Obat yang Baik bagi PSE (Electronic System Operator).

- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI 2020 - 62012), yang mencakup kegiatan usaha sebagai berikut:
  Mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet; dan

- Portal Web Dan/Atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 2020 - 63122), yang mencakup kegiatan usaha sebagai berikut:
  Mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa

dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services.

D. ANALISA PROYEKSI KEUANGAN

PROYEKSI KEUANGAN TANPA DAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Berikut ini adalah proyeksi Laporan Posisi Keuangan PPG tanpa dan dengan penambahan kegiatan usaha pada tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan 2030.

Keterangan	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aset						
Aset lancar						
Kas dan setara kas	931.676	1.063.330	1.288.917	1.619.931	2.056.024	2.608.041
Piutang usaha - pihak ketiga	1.979.545	2.118.113	2.298.153	2.493.496	2.692.975	2.908.413
Piutang lain-lain						
Pihak ketiga	334.607	368.067	404.874	445.361	489.897	538.887
Pihak berelasi	130.273	136.786	143.625	150.807	158.347	166.264
Persediaan	1.568.764	1.670.733	1.799.380	1.937.932	2.081.339	2.235.358
Pajak dibayar dimuka	461.837	480.311	499.523	519.504	540.284	561.896
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1.613	1.776	1.953	2.149	2.364	2.600
Jumlah aset lancar	5.408.315	5.839.116	6.436.425	7.169.180	8.021.230	9.021.459

Keterangan	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aset tidak lancar						
Uang muka pembelian aset tetap	1.084	1.192	1.311	1.443	1.587	1.745
Uang muka aset hak guna	8.624	9.487	10.435	11.479	12.627	13.890
Aset tetap, neto	216.456	209.095	200.189	191.166	183.681	182.162
Aset hak guna, neto	50.644	29.809	8.974	-	-	-
Aset pajak tangguhan, neto	35.458	39.004	42.904	47.195	51.914	57.105
Aset takberwujud, neto	1.141	3.522	5.025	5.894	6.042	6.194
Aset tidak lancar lainnya	2.823	3.105	3.417	3.758	4.133	4.547
Aset keuangan tidak lancar lainnya	3.869	3.869	3.869	3.867	3.869	3.869
Jumlah aset tidak lancar	320.099	299.083	276.124	264.802	263.853	269.512
Jumlah aset	5.728.414	6.138.199	6.712.549	7.433.982	8.285.083	9.290.971

Keterangan	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Liabilitas dan Ekuitas						
Liabilitas						
Liabilitas jangka pendek						
Utang usaha - pihak ketiga	2.946.025	3.137.517	3.379.105	3.639.296	3.908.604	4.197.841
Utang lain-lain						
Pihak ketiga	72.353	79.589	87.548	96.302	105.933	116.526
Pihak berelasi	1.178	-	-	-	-	-
Utang pajak	934	1.027	1.130	1.243	1.367	1.504
Beban akrual	26.128	27.434	28.806	30.246	31.758	33.346
Liabilitas imbalan kerja karyawan - jangka pendek	8.227	9.050	9.955	10.951	12.046	13.251
Liabilitas sewa - jangka pendek	10.022	11.024	12.126	13.339	14.673	16.140
Jumlah liabilitas jangka pendek	3.064.867	3.265.641	3.518.670	3.791.377	4.074.381	4.378.608
Liabilitas jangka panjang						
Liabilitas sewa - jangka panjang	4.936	5.430	5.973	6.571	7.228	7.951
Liabilitas imbalan kerja karyawan	93.953	103.348	113.684	125.052	137.557	151.311
Jumlah liabilitas jangka panjang	98.889	108.778	119.657	131.623	144.785	159.262
Jumlah liabilitas	3.163.756	3.374.419	3.638.327	3.923.000	4.219.166	4.537.870

Berikut ini adalah proyeksi Laporan Laba Rugi PPG tanpa dan dengan penambahan kegiatan usaha pada tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan 2030.

Keterangan	Proyeksi						
	Okt-Des 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	2.815.011	10.791.369	11.546.764	12.528.239	13.593.140	14.680.591	15.855.038
Beban pokok penjualan	(2.442.386)	(9.747.924)	(10.381.996)	(11.181.410)	(12.042.378)	(12.933.514)	(13.890.594)
Laba kotor	372.625	1.043.445	1.164.768	1.346.829	1.550.762	1.747.077	1.964.444
Beban penjualan	(141.204)	(484.613)	(557.305)	(595.202)	(635.676)	(678.901)	(725.067)
Beban umum dan administrasi	(12.815)	(29.723)	(34.181)	(35.754)	(37.398)	(39.119)	(40.918)
Pendapatan lainnya	(195)	3.635	3.817	4.007	4.208	4.418	4.639
Beban lainnya	(4.910)	(17.993)	(18.893)	(19.837)	(20.829)	(21.871)	(22.964)
Laba operasi	213.501	514.751	558.206	700.043	861.067	1.011.604	1.180.134
Pendapatan keuangan	4.318	18.178	19.087	20.041	21.043	22.095	23.200
Beban keuangan	(1.326)	(1.424)	(1.495)	(1.570)	(1.648)	(1.731)	(1.817)
Laba sebelum pajak penghasilan badan	216.493	531.505	575.798	718.514	880.462	1.031.968	1.201.517
Beban pajak penghasilan badan	(48.946)	(116.931)	(126.676)	(158.073)	(193.701)	(227.033)	(264.334)
Laba bersih	167.547	414.574	449.122	560.441	686.761	804.935	937.183

Rasio Profitabilitas

Keterangan	Okt-Des 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Imbal Balik Aset	n.r	7,16%	7,32%	8,35%	9,24%	9,72%	10,09%
Imbal Balik Ekuitas	n.r	16,00%	16,25%	18,23%	19,56%	19,80%	19,72%
Marjin Laba Kotor	13,24%	9,67%	10,09%	10,75%	11,41%	11,90%	12,39%
Marjin Laba Usaha	7,58%	4,77%	4,83%	5,59%	6,33%	6,89%	7,44%
Marjin Laba Bersih	5,95%	3,84%	3,89%	4,47%	5,05%	5,48%	5,91%

Selama periode proyeksi, seluruh rasio profitabilitas tanpa dan dengan penambahan kegiatan usaha terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Rasio profitabilitas yang cenderung meningkat menggambarkan bahwa PPG mengelola aspek keuangan dengan baik.

Rasio Likuiditas

Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio Kas	0,30	0,33	0,37	0,43	0,50	0,60
Rasio Cepat	1,76	1,79	1,83	1,89	1,97	2,06
Rasio Lancar	1,25	1,28	1,32	1,38	1,46	1,55

Selama periode proyeksi, seluruh rasio Likuiditas tanpa dan dengan penambahan kegiatan usaha terus mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Rasio Aktivitas

Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perputaran Piutang Usaha	67	67	67	67	67	67
Perputaran Persediaan	59	59	59	59	59	59
Perputaran Utang Usaha	110	110	110	111	110	110

Rasio aktivitas selama periode proyeksi tanpa dan dengan penambahan kegiatan usaha stabil dari tahun 2025 sampai dengan 2030.

E. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Asumsi Studi Kelayakan Bisnis

a) Laporan Studi Kelayakan Bisnis yang dihasilkan bersifat *non-disclaimer opinion*.
b) Studi Kelayakan Bisnis ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam penugasan ini, KJPP-WJR melandaskan dan berdasarkan pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan PPG atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
c) KJPP-WJR mengasumsikan bahwa semua informasi dan data dari PPG terkait penugasan adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan, dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi penilaian ini.

Kondisi Pembatas

a) Studi Kelayakan Bisnis harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan Studi Kelayakan Bisnis merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
b) Studi Kelayakan Bisnis disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat laporan diterbitkan.
c) Studi Kelayakan Bisnis menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat manajemen yang telah KJPP-WJR reviu kewajarannya, manajemen bertanggung jawab atas pencapaian proyeksi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang.
d) KJPP-WJR bertanggung jawab atas opini kelayakan bisnis.
e) KJPP-WJR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.

f) KJPP-WJR tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Objek Studi Kelayakan Bisnis dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan, maka dari itu KJPP-WJR tidak memberikan pendapat atas dampak hukum dan perpajakan dari Studi Kelayakan Bisnis tersebut. Jasa-jasa yang KJPP-WJR berikan kepada Pemberi Tugas dalam kaitan dengan penugasan tersebut hanya merupakan pemberian opini atas kelayakan suatu bisnis yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.

g) KJPP-WJR menyatakan bahwa penugasan KJPP-WJR tidak termasuk menganalisis kegiatan-kegiatan usaha di luar objek studi kelayakan bisnis yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari kegiatan-kegiatan usaha tersebut terhadap Perseroan, dan juga bukan merupakan analisis penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari objek studi kelayakan bisnis.

h) Pekerjaan KJPP-WJR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum.

i) Penugasan KJPP-WJR juga tidak termasuk untuk memberikan keterangan di muka pengadilan, kantor pajak, atau lembaga lainnya.

j) Laporan Studi Kelayakan Bisnis tersebut terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional PPG.

k) Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan Bisnis, KJPP-WJR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan PPG ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan PPG. KJPP-WJR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

F. PENDEKATAN DAN METODE PENYUSUNAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN BISNIS

a) Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha PPG adalah dengan melakukan analisis atas kelayakan pasar, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen dan kelayakan keuangan.

b) Dari kajian **kelayakan pasar**, dengan adanya penambahan KBLI maka tidak ada perubahan pangsa pasar, potensi pasar dan potensi nilai pasar Perseroan, karena penambahan KBLI ini hanya terkait penyesuaian klasifikasi KBLI yang dimiliki Perseroan agar sesuai dengan kegiatan usahanya yang telah berjalan selama ini.

c) Dari kajian **kelayakan pola bisnis**, menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan usaha, maka pola bisnis Perseroan tidak mengalami perubahan, karena rencana penambahan KBLI hanya untuk penyesuaian legalitas atas KBLI yang dimiliki oleh Perseroan saat ini agar sesuai dengan kegiatan usaha yang telah dijalankan selama ini. Sehingga, dengan penambahan KBLI, tidak menimbulkan perubahan atas kegiatan operasional Perseroan ke depannya.

d) Dari kajian **kelayakan model manajemen**, menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan usaha, maka model manajemen Perseroan tidak mengalami perubahan, karena rencana penambahan KBLI hanya untuk penyesuaian legalitas atas KBLI yang dimiliki oleh Perseroan saat ini agar sesuai dengan kegiatan usaha yang telah dijalankan selama ini. Sehingga, dengan penambahan KBLI, tidak menimbulkan perubahan atas kegiatan operasional Perseroan kedepannya.

e) Pada **kajian kelayakan keuangan**, tidak ada dampak keuangan ataupun manfaat secara kuantitatif akibat penambahan KBLI, karena rencana penambahan KBLI hanya untuk penyesuaian legalitas atas KBLI yang dimiliki oleh Perseroan saat ini agar sesuai dengan kegiatan usaha yang telah dijalankan selama ini. Sehingga, dengan penambahan KBLI, tidak menimbulkan perubahan atas kegiatan operasional Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan kedepannya.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diungkapkan di atas maka kami berpendapat bahwa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT Parit Padang Global dimaksud adalah **"LAYAK"**.

IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha, PT Parit Padang Global tidak memiliki tim teknologi informasi (IT) secara khusus. Namun demikian, aplikasi dan sistem yang digunakan akan memperoleh dukungan penuh dari tim IT eksisting yang berada dalam struktur organisasi grup Perseroan (SGH Group).

Untuk mendukung kegiatan usaha berbasis web/digital/e-commerce, Perseroan akan menugaskan sekitar 7 (tujuh) orang tenaga kerja yang didedikasikan khusus untuk pengelolaan platform digital. Tenaga kerja tersebut berasal dari sumber daya internal Perseroan dan akan ditempatkan pada fungsi operasional, pengelolaan platform, pemasaran, serta penjualan.

Tenaga kerja eksisting yang dialokasikan tersebut memiliki pengalaman dalam pengelolaan bisnis B2B, pemasaran, dan penjualan, sehingga dinilai memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha baru.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Penambahan kegiatan usaha dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan penyelarasan klasifikasi kegiatan usaha PPG agar sesuai dengan kegiatan usaha yang telah dan/atau sedang dijalankan dalam praktik. Penambahan kegiatan usaha ini tidak dimaksudkan untuk mengubah karakteristik usaha utama, pola bisnis, model manajemen, maupun segmen pasar PPG, melainkan untuk memastikan kesesuaian antara kegiatan usaha PPG dengan ketentuan perizinan dan Anggaran Dasar yang berlaku.

a) Penyesuaian klasifikasi KBLI terhadap kegiatan usaha yang telah berjalan

Penambahan 2 (dua) KBLI dilakukan untuk menyesuaikan klasifikasi kegiatan usaha PPG agar selaras dengan kegiatan usaha yang telah dijalankan selama ini, sehingga tidak terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan usaha PPG dengan klasifikasi KBLI yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

b) Tidak mengubah pangsa pasar dan potensi usaha PPG

Berdasarkan Studi Kelayakan Bisnis, penambahan KBLI tidak mengakibatkan perubahan terhadap pangsa pasar, potensi pasar, maupun potensi nilai pasar PPG, karena penambahan KBLI hanya bersifat penyesuaian legalitas dan tidak mengubah ruang lingkup kegiatan usaha PPG.

c) Tidak mengubah pola bisnis dan model manajemen

Penambahan kegiatan usaha tidak mengakibatkan perubahan terhadap pola bisnis maupun model manajemen PPG, karena tidak disertai dengan perubahan atas proses operasional, struktur organisasi, ataupun sistem pengelolaan usaha PPG.

d) Tidak mengubah kegiatan operasional PPG ke depan

Sejalan dengan Studi Kelayakan Bisnis, penambahan KBLI tidak menimbulkan perubahan terhadap kegiatan operasional PPG di masa mendatang, mengingat kegiatan usaha yang ditambahkan telah dijalankan sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direksi PPG berpendapat bahwa rencana perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha merupakan langkah yang wajar dan rasional, serta tidak mengubah kegiatan operasional maupun karakteristik usaha PPG.

e) Hal Material Lainnya

Penambahan kegiatan usaha dimaksud tidak memerlukan belanja modal yang signifikan, mengingat kegiatan/aplikasi tersebut telah berjalan sebelumnya dan telah didukung oleh infrastruktur yang tersedia saat ini di PT Parit Padang Global, yakni PPGOS.

VI. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berdasarkan Studi Kelayakan Bisnis, penambahan kegiatan usaha PPG tidak menimbulkan dampak keuangan maupun manfaat secara kuantitatif yang material, karena penambahan KBLI hanya merupakan penyesuaian legalitas atas kegiatan usaha yang telah dijalankan selama ini.

Oleh karena itu, penambahan kegiatan usaha tersebut tidak mengakibatkan perubahan terhadap pendapatan, laba, maupun ekuitas PPG.

Penambahan kegiatan usaha ini juga tidak memerlukan investasi baru dalam bentuk belanja modal (capital expenditure). Seluruh kebutuhan biaya yang timbul, termasuk pengembangan dan pemeliharaan sistem serta dukungan operasional, didanai melalui modal kerja Perseroan, sehingga tidak mengakibatkan penambahan aset atau liabilitas yang signifikan.

Berdasarkan analisis proyeksi keuangan sebelum dan sesudah penambahan kegiatan usaha, tidak terdapat perbedaan material terhadap pendapatan, beban, laba, aset, maupun liabilitas Perseroan. Rasio keuangan Perseroan, termasuk rasio profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas, juga tidak menunjukkan perubahan signifikan antara kedua skenario tersebut.

Dengan demikian, perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha ini tidak menimbulkan dampak material terhadap kinerja keuangan PPG di masa mendatang dan tidak merugikan kepentingan pemegang saham PPG.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, Perseroan kembali menegaskan perbandingan data proyeksi keuangan Perseroan sebelum dan sesudah penambahan kegiatan usaha sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dalam bagian D (Analisa Proyeksi Keuangan) pada Bab III mengenai Ringkasan Studi Kelayakan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 15 Januari 2026 dalam tabel di bawah ini. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang material pada indikator kinerja keuangan Perseroan dalam kedua skenario tersebut.

Keterangan	Okt-Des 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Imbal Balik Aset	n.r	7,16%	7,32%	8,35%	9,24%	9,72%	10,09%
Imbal Balik Ekuitas	n.r	16,00%	16,25%	18,23%	19,56%	19,80%	19,72%
Marjin Laba Kotor	13,24%	9,67%	10,09%	10,75%	11,41%	11,90%	12,39%
Marjin Laba Usaha	7,58%	4,77%	4,83%	5,59%	6,33%	6,89%	7,44%
Marjin Laba Bersih	5,95%	3,84%	3,89%	4,47%	5,05%	5,48%	5,91%

Selama periode proyeksi, seluruh rasio profitabilitas tanpa dan dengan penambahan kegiatan usaha terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Rasio profitabilitas yang cenderung meningkat menggambarkan bahwa PPG mengelola aspek keuangan dengan baik.

Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio Kas	0,30	0,33	0,37	0,43	0,50	0,60
Rasio Cepat	1,76	1,79	1,83	1,89	1,97	2,06
Rasio Lancar	1,25	1,28	1,32	1,38	1,46	1,55

Selama periode proyeksi, seluruh rasio Likuiditas tanpa dan dengan penambahan kegiatan usaha terus mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perputaran Piutang Usaha	67	67	67	67	67	67
Perputaran Persediaan	59	59	59	59	59	59
Perputaran Utang Usaha	110	110	110	111	110	110

Rasio aktivitas selama periode proyeksi tanpa dan dengan penambahan kegiatan usaha stabil dari tahun 2025 sampai dengan 2030.

VII. INFORMASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dengan rincian jadwal pelaksanaannya sebagaimana telah diungkapkan Perseroan dalam Keterbukaan Informasi tertanggal 15 Januari 2026 yakni adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman RUPSLB kepada Pemegang Saham	15 Januari 2026
2	Batas tanggal terakhir pengajuan usulan mata acara RUPSLB dari Pemegang Saham	Maksimal 23 Januari 2026
3	Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB (*Recording Date*)	29 Januari 2026
4	Pemanggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham	30 Januari 2026
5	Penyelenggaraan RUPSLB	23 Februari 2026
6	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	23 Februari 2026
7	Penyampaian Risalah RUPS Tahunan	Maksimal 25 Maret 2026

Mata acara yang akan dimohonkan sehubungan dengan rencana Transaksi adalah:

1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan dan atau Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
2. Persetujuan atas Rencana Perubahan dan atau Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.
3. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan dan atau Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali Perseroan yaitu PT Parit Padang Global, untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
4. Persetujuan Rencana Perubahan dan/atau penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali, yakni PT Parit Padang Global
5. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan dan atau Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali Perseroan yaitu PT Soho Industri Pharmasi, untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
6. Persetujuan Rencana Perubahan dan/atau penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali Perseroan, yakni PT Soho Industri Pharmasi
7. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Pengumuman, Pemanggilan, dan Pengumuman Ringkasan Risalah terkait RUPSLB Perseroan tersebut akan Perseroan sampaikan melalui (i) Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten

dan Perusahaan Publik IDX dan OJK, (ii) situs web (*website*) resmi Perseroan, dan (iii) Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), sesuai jadwal di atas dan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan

RUPS akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 42 POJK No. 15/2020, maka RUPS dapat dilangsungkan untuk membahas mata acara tersebut jika:

1. **RUPS Pertama**
   RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau penerima kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   Keputusan RUPS adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. **RUPS Kedua**
   Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud ditatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau penerima kuasanya yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   Keputusan RUPS kedua adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.
3. **RUPS Ketiga**
   Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 17/2020, dalam hal Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tidak memperoleh persetujuan RUPS, maka Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui tersebut.

Sehubungan dengan penambahan KBLI yang mengakibatkan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, perubahan tersebut merupakan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. LAIN-LAIN

(i) **Keberatan dari pihak-pihak terkait rencana perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan**

Sampai dengan tanggal penerbitan Penambahan Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak menerima adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan rencana perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan.

(ii) Persetujuan dan/atau perizinan dan/atau pemberitahuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain atau pihak ketiga lainnya yang harus dipenuhi oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selain kewajiban yang diatur POJK No. 17/POJK.04/2020 dalam rangka Perubahan dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan

Setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan akan melakukan penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Selain itu, Perseroan tidak memiliki kewajiban pengajuan perizinan tambahan sehubungan dengan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, mengingat Perseroan tidak menyediakan dan/atau mengoperasikan platform elektronik sendiri, melainkan hanya melakukan kegiatan penjualan ritel melalui platform e-commerce pihak ketiga.

Selanjutnya, PPG akan mengajukan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dengan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 27 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan Makanan, guna dapat menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik untuk kegiatan distribusi obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Penambahan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
u.p: Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930, Indonesia
Telepon: +62 21 4683 2588
Faksimile: +62 21 4683 2589
Email address: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Website: www.sohoglobalhealth.com

ADDITION TO THE DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS REGARDING THE ADDITION OF BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY AND THE COMPANY'S CONTROLLED COMPANIES

PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK

("Company")

Domiciled in East Jakarta, Indonesia

Business Sector
Healthcare/Pharmaceutical Industry

Business Activities
Holding Company Activities; Management Consulting Activities.

Head Office
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930, Indonesia
Telephone: +62 21 4683 2588
Facsimile: +62 21 4683 2589
Email Address: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Website: www.sohoglobalhealth.com

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, either individually or jointly, hereby declare that they are fully responsible for the accuracy and completeness of the information disclosed in this information disclosure ('Information Disclosure'), and after having conducted a careful examination, affirm that the information disclosed in this Information Disclosure is true and that there are no material and relevant facts that have been omitted or not disclosed, which could cause the information disclosed herein to be untrue and/or misleading.

This Information Disclosure is prepared for the benefit of the Company's Shareholders in order to provide the Company's Shareholders with complete information regarding the transaction relating to the planned change and/or addition of business activities of PT PPG, which is a Controlled Company of the Company. This Information Disclosure is submitted in compliance with the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ('POJK No. 17/2020')

This Supplementary Disclosure constitutes an addition to the Disclosure of Information previously published on 15 January 2026.

This Disclosure of Information is published in Jakarta
on 19 February 2026

I. PRELIMINARY

This Additional Information Disclosure is prepared in order to add and clarify the substance of the Information Disclosure that has been issued on January 15, 2026 and to fulfill the Company's obligation to announce the Information Disclosure regarding changes and or additions to business activities that will be carried out by the Company's controlled company, namely, PT Parit Padang Global ("PPG"). Changes and or additions to business activities where before PPG can carry out the Transaction, the Company is required to obtain approval from the Company's Shareholders in the General Meeting of Shareholders ("GMS") in connection with the additions to the Company's business activities.

II. INFORMATION OF THE COMPANY AND PT PPG

1. PT Soho Global Health Tbk ("Company")

General Information of the Company

The Company is a limited liability company with the status of a publicly held company, domiciled in East Jakarta, established in 1956 by the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, under the name PT Perseroan Dagang dan Industri Pharmasi Parit Padang or abbreviated as PT Parit Padang, based on the Deed of Establishment No. 116 dated August 27, 1956, made before Eliza Pondaag, Notary in Jakarta. It has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("**MLHR**") based on Decree No. J.A.5/16/14 dated February 8, 1957, registered in the register book at the Jakarta District Court under No. 377 dated February 16, 1957, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia ("**BNRI**") No. 39 dated May 14, 1957, Supplement No. 517.

In 2010, the Company changed its name to PT Soho Global Health based on the Deed of Statement of Circular Resolutions of Shareholders No. 23 dated October 29, 2010, made before Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notary in Jakarta. This change was approved by the MLHR through Decree No. AHU-54235.AH.01.02.Tahun 2010 dated November 18, 2010, and registered in the Company Register at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("**MOLHR**") No. AHU-0083819.AH.01.09.Tahun 2010 dated November 18, 2010. It was also notified to MLHR as evidenced by the Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.10-31225 dated December 6, 2010, and registered in the Company Register at MOLHR No. AHU-0088241.AH.01.09.Tahun 2010 dated December 6, 2010, and announced in the BNRI No.

26 dated March 30, 2012, Supplement No. 13396, and BNRI No. 59 dated July 24, 2012, Supplement No. 1903/L.

In 2020, the Company changed its name to PT Soho Global Health Tbk and adjusted all provisions of its articles of association to comply with the applicable regulations regarding the change of the Company's status from a closed company to a publicly held company. This change was stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 126 dated June 19, 2020, made before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta. It received approval from the MLHR through Decree No. AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020 dated June 23, 2020, was registered in the Company Register at the MOLHR No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 dated June 23, 2020. It was also notified to MLHR as evidenced by the Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association with 2 (two) letters No. AHU-AH.01.03-0255808 and No. AHU-AH.01.03-0255815 both dated June 23, 2020, and registered in the Company Register at MOLHR No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 dated June 23, 2020 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 176 dated 26 October 2020, Supplement No. 13,478. The Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange through an Initial Public Offering on September 8, 2020.

The latest changes to the Company's Articles of Association are recorded in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 175 dated October 19, 2023, made before Jimmy Tanal S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta, whose data changes have been received and recorded in the SABH database of the Ministry of Law and Human Rights with his Letter No. AHU-AH.01.03-0134270 dated October 27, 2023 and have been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 90 dated November 10, 2023, supplement 35319, which regulates changes to the Company's capital structure. Meanwhile, the Company's board of directors was last changed in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 102 dated September 16, 2025, made before Jimmy Tanal S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta, whose notification of data changes has been received and recorded in the SABH database of the Ministry of Law and Human Rights with his Letter No. AHU-AH.01.09-0344487 dated September 30, 2025.

Based on the Company's Articles of Association as set forth in Deed No. 126 dated June 19, 2020 drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta the business activities carried out by the Company (in reference to the 2020 KBLI) are, as detailed below:

a) Holding Company Activities (KBLI 2020 - 64200)

   This classification covers the activities of holding companies, namely companies that control the assets of a group of subsidiary companies and whose principal activity is the ownership of such a group. "Holding Companies" are not involved in the operational business activities of their subsidiaries.

b) Other Management Consulting Activities (KBLI 2020 - 70209)

This classification covers the provision of advice, guidance, and operational assistance to other businesses and organizations on various management issues. Such business services may include advice, guidance, and operational assistance to business entities and public or community services in various management and operational aspects. This sub-classification also includes the provision of advisory, guidance, and operational assistance regarding organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; financial decision-making; marketing objectives and policies; human resource planning, practices, and policies; production scheduling, planning, and control.

These services may include advisory assistance, guidance, and operational support to businesses and public services relating to public relations and public communications, lobbying activities, the design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budgetary control procedures, as well as advice and assistance in planning, organizing, efficiency, and supervision, management information, and other related matters.

There is no change in the business activities carried out by the Company between Deed No. 126 dated 19 June 2020 and Deed No. 102 dated 16 September 2025.

Capital Structure and Shareholders' Composition of the Company

The capital structure and composition of the Company's shareholders, namely the number of shares in the portfolio, as well as adding information regarding authorized capital, issued and fully paid capital, and shares in the portfolio in the following table are prepared with reference to: (i) Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 175 dated October 19, 2023, made before Jimmy Tanal S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta, the changes to the data of which have been received and recorded in the SABH database of the Ministry of Law and Human Rights with its Letter No. AHU-AH.01.03-0134270 dated October 27, 2023 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 90 dated November 10, 2023, supplement 35319; and (ii) The Company's monthly List of Shareholders (DPS) published by the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, as of January 31, 2026 is as follows:

❖ **Capital Structure and Shareholders' Composition of the Company**

Explanation	Number of Shares (shares)	Nominal Amount (IDR)	Ownership (%)
Authorized Capital	28,635,121,560	1,431,756,078,000	
Cascade Creek Pty Ltd	1,537,362,000	76,868,100,000	12.113
Fraburg Pty Limited	1,201,822,210	60,091,110,500	9.469
Medisia Investment Holdings Pte. Ltd.	2,851,733,000	142,586,650,000	22.469
Tan Giok Nio	1,143,986,170	57,199,308,500	9.014
Tiberias 96 Pty Ltd	4,812,370,310	240,618,515,500	37.918

Publik ((each under 5%)	1,143,807,000	57,190,350,000	9.012
Issued and Paid-up Capital	12,691,682,390	634,584,119,500	100.00
Authorized but unissued shares	15,943,439,170	797,171,958,500	-

- Nominal Value
  Each share has a nominal value of IDR 50 (fifty Rupiah) per share

❖ **Company Controller**

Based on Article 85 of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Capital Market Activities, in conjunction with Article 1 number 4 of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation Number 9/POJK.04/2018 concerning Takeovers of Public Companies, the following parties are considered to be the Company Controllers:

Shareholders	Number of Shares (sheets)	Nominal Amount (Rupiah)	Ownership(%)
Cascade Creek Pty Ltd	1,537,362,000	76,868,100,000	12.113
Tiberias 96 Pty Ltd	4,812,370,310	240,618,515,500	37.918

This information is also consistently disclosed by the Company to the public on a monthly basis through the Monthly Report on the Registration of Securities Holders.

❖ **Ultimate Beneficial Owner of the Company**

The individual who is the Ultimate Beneficial Owner of the Company is Mr. Eng Liang Tan. This information is also consistently disclosed by the Company to the public on a monthly basis through the Monthly Report on the Registration of Securities Holders via the Electronic Reporting System.

Board of Commissioners and Board of Directors Composition of the Company

Based on the Deed of Statement of the Company's Meeting Resolutions No. 102 dated September 16, 2025, the data of which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System ("SABH") of the Ministry of Law and Human Rights under its Letter No. AHU-AH.01.09-0344487 dated September 30, 2025, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the date of this Information Disclosure is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Eng Liang Tan

Independent Commissioner : Harry Salam
Commissioner : Andy Nugroho Purwohardono

Board of Directors
President Director : Ery Yunasri
Director : Piero Brambati
Director : Yuliana
Director : Richard Kidarsa
Director : Lim Chern Han
Director : Pandy Harianto

The Company's Group Financial Report

The audited consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of and for the years ended December 31, 2020 through 2024, and the audited interim financial statements for the 9 (nine)-month period ended September 30, 2025, are as follows:

In millions Rupiah	31 December					30 September 2025
Description	2020	2021	2022	2023	2024	
Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income						
Revenue	6.163.939	7.076.164	7.290.121	8.197.755	10.057.938	7.924.506
Gross Profit	1.346.313	1.569.353	1.338.391	1.309.356	1.540.838	1.309.082
Operating Profit	259.843	677.289	443.659	438.670	571.247	548.422
Profit Before Income Tax	249.674	691.157	455.637	463.396	588.038	563.299
Net Profit	172.200	551.091	357.015	371.341	462.651	440.092
Comprehensive Income	164.806	553.710	372.904	371.331	468.418	432.604

Source: SOHO Group Consolidated Audited Financial Statements as of December 31, 2020-2024 and Interim Audited Financial Statements as of September 30, 2025

In millions Rupiah	31 December					30 September 2025
Description	2020	2021	2022	2023	2024	
Statement of Financial Position						
Current Assets	3.405.989	3.341.171	3.873.438	4.140.019	4.749.357	5.354.074
Non-Current Assets	774.254	680.748	601.161	606.941	662.666	660.859
Total Assets	**4.180.243**	**4.021.919**	**4.474.599**	**4.746.960**	**5.412.023**	**6.014.933**
Current Liabilities	1.797.440	1.654.049	1.898.934	2.186.112	2.526.572	2.979.043
Long-Term Liabilities	176.701	159.579	148.110	161.750	170.235	188.862
Total Liabilities	**1.974.141**	**1.813.628**	**2.047.044**	**2.347.862**	**2.696.807**	**3.167.906**
Total Equity	**2.206.102**	**2.208.291**	**2.427.555**	**2.399.098**	**2.715.216**	**2.847.027**
Total Liabilities and Equity	**4.180.243**	**4.021.919**	**4.474.599**	**4.746.960**	**5.412.023**	**6.014.933**

Source: SOHO Group Consolidated Audited Financial Statements as of December 31, 2020-2024 and Interim Audited Financial Statements as of September 30, 2025

In millions Rupiah	31 December					30 September 2025
Description	2020	2021	2022	2023	2024	
Gross Profit Margin	21,84%	22,18%	18,36%	15,97%	15,32%	16,52%
Operating Profit Margin	4,22%	9,58%	6,09%	5,35%	5,68%	6,55%
Net Profit Margin	2,79%	7,79%	4,90%	4,53%	4,60%	5,55%

Return on Assets	4,12%	13,70%	7,98%	7,82%	8,55%	7,32%
Return on Equity	7,81%	24,96%	14,71%	15,48%	17,04%	15,46%
Current Ratio	1,89	2,02	2,04	1,89	1,88	1,80
Quick Ratio	1,31	1,34	1,44	1,26	1,24	1,29

Source: SOHO Group Consolidated Audited Financial Statements as of December 31, 2020-2024 and Interim Audited Financial Statements as of September 30, 2025

2. PT Parit Padang Global ("PPG")

General Information of the PPG

PPG is a private company, domiciled in East Jakarta, established under the name PT Parit Padang Global pursuant to the Deed of Establishment No. 01 dated 3 August 2009, drawn up before Yani Indrawaty Wibawa, Notary in Jakarta, which has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights pursuant to Decree No. AHU-42317.AH.01.01 dated 28 August 2009, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 66 dated 16 August 2010, Supplement No. 11835.

PPG is a Controlled Company of the Company, directly controlled by the Company, in which the Company holds 99.9999% of the shares directly. The financial statements of PPG are also consolidated with those of the Company.

The Articles of Association of PPG as set forth in the Deed of Establishment of PPG have undergone several amendments since its establishment, with the most recent amendment as stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions of PPG No. 174 dated 26 August 2025, drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the notification of such amendment having been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System ("SABH") of the Ministry of Law and Human Rights under its Letter No. AHU-AH.01.09-0334846 dated 8 September 2025.

The Articles of Association of PT SIP as set forth in the Deed of Establishment of PT SIP have undergone several amendments since its establishment, with the most recent amendment as stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions of PT SIP No. 32 dated 4 September 2025, drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the notification of such amendment having been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System ("SABH") of the Ministry of Law and Human Rights under its Letter No. AHU-AH.01.09-0334848 dated 8 September 2025.

Based on the Company's Articles of Association as set forth in Deed No. 42 dated 17 February 2022, drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, and with reference to the 2020 Indonesian Standard Industrial Classification Code (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia — "KBLI") applicable as of the issuance date of this Business Feasibility Study, the business activities carried out by PPG are covered under 25 (twenty-five) KBLI classifications, as detailed below:

a. Wholesale Trade of Beef and Processed Beef Products (KBLI 2020 – 46321)
   This classification covers wholesale trading of beef and processed beef products, including preserved beef.
b. Wholesale Trade of Chicken and Processed Chicken Products (KBLI 2020 – 46322)
   This classification covers wholesale trading of chicken and processed chicken products, including preserved chicken.
c. Wholesale Trade of Processed Fishery Products (KBLI 2020 – 46324)
   This classification covers wholesale trading of processed fishery products.
d. Wholesale Trade of Eggs and Processed Egg Products (KBLI 2020 – 46325)
   This classification covers wholesale trading of eggs and processed egg products.
e. Wholesale Trade of Milk and Dairy Products (KBLI 2020 – 46326)
   This classification covers wholesale trading of milk and dairy products.
f. Wholesale Trade of Animal Oils and Fats (KBLI 2020 – 46327)
   This classification covers wholesale trading of animal oils and fats.
g. Wholesale Trade of Sugar, Chocolate, and Confectionery (KBLI 2020 – 46331)
   This classification covers wholesale trading of sugar, chocolate, confectionery, and sweetening preparations.
h. Wholesale Trade of Bakery Products (KBLI 2020 – 46332)
   This classification covers wholesale trading of bakery products, cakes, and other bakery items.
i. Wholesale Trade of Non-Alcoholic Beverages (Excluding Milk-Based Beverages) (KBLI 2020 – 46334)
   This classification covers wholesale trading of non-alcoholic beverages such as fruit juice, soft drinks, mineral water, bottled water, and similar products.
j. Wholesale Trade of Other Food and Beverages (KBLI 2020 – 46339)
   This classification covers wholesale trading of other food and beverage products such as rice flour, tapioca flour, bakery premixes, caramel, processed honey, shrimp crackers, and others.
   It also includes food for special nutritional purposes (for infants, children, and adults), food additives, processing aids, snack foods, cereals and cereal-based products (processed and unprocessed), soy-based beverages, ready-to-eat foods, as well as wholesale trading of pet food and animal feed.
k. Wholesale Trade of Clothing (KBLI 2020 – 46412)
   This classification covers wholesale trading of clothing, including sportswear and clothing accessories such as gloves, ties, and clips, including hosiery.
l. Wholesale Trade of Photographic Equipment and Optical Goods (KBLI 2020 – 46430)
   This classification covers wholesale trading of photographic equipment and optical goods (such as eyeglasses, binoculars, and magnifying glasses).
m. Wholesale Trade of Household Equipment and Supplies (KBLI 2020 – 46491)
   This classification covers wholesale trading of household equipment and supplies such as furniture, kitchen and cooking utensils, lamps and lighting equipment, consumer electronics (radio, television, CD and DVD players and recorders), stereo equipment, video game consoles, lighting devices, porcelain and glass tableware, cutlery, wooden goods, wicker goods, cork products, carpets, and similar items.

n. Wholesale Trade of Pharmaceutical Products for Human Use (KBLI 2020 – 46441)
This classification covers wholesale trading of pharmaceutical products for household use, such as medicines and health supplements for humans.

o. Wholesale Trade of Pharmaceutical Raw Materials for Human and Animal Use (KBLI 2020 – 46447) This classification covers wholesale trading of pharmaceutical raw materials for both human and animal use.

p. Wholesale Trade of Traditional Medicines for Human Use (KBLI 2020 – 46442)
This classification covers wholesale trading of traditional medicines (herbal medicines) and health supplements for human use.

q. Wholesale Trade of Raw Materials for Traditional Medicines for Human and Animal Use (KBLI 2020 – 46448)
This classification covers wholesale trading of raw materials for traditional medicines for both human and animal use.

r. Wholesale Trade of Cosmetics for Human Use (KBLI 2020 – 46443)
This classification covers wholesale trading of cosmetics for human use such as perfume, soap, powder, and other cosmetic products.

s. Wholesale Trade of Various Other Household Goods and Supplies (Not Elsewhere Classified) (KBLI 2020 – 46449)
This classification covers wholesale trading of various other household goods and supplies, such as leather goods, luggage, cleaning equipment, and similar items. It also includes sound and video recordings in cassettes, CDs, and DVDs, household chemicals (detergents, floor cleaners, etc.), and educational aids.

t. Wholesale Trade of Laboratory Equipment, Pharmaceutical Equipment, and Medical Devices for Human Use (KBLI 2020 – 46691)
This classification covers wholesale trading of laboratory equipment, pharmaceutical equipment, and medical devices for human use.

u. Wholesale Trade of Other Products (Not Elsewhere Classified) (KBLI 2020 – 46699)
This classification covers wholesale trading of other products not classified under the above wholesale trade groups, including textile fibers and similar products, as well as wholesale trading of precious stones (diamonds, gems, sapphires, etc.).

v. Warehousing and Storage (KBLI 2020 – 52101)
This classification includes businesses that carry out temporary storage activities for goods before they are sent to their final destination, for commercial purposes.

w. Cold Storage Activities (KBLI 2020 – 52102)
This classification covers the storage of goods requiring temperature control for a certain preservation period on a fee or contract basis before the goods are delivered to their final destination.
This classification also includes quick-freezing warehouses (blast freezing).

x. Bonded Warehousing Activities or Bonded Zone Operations (KBLI 2020 – 52103)
This classification covers activities within customs areas that receive special treatment under government regulations as if located outside the customs territory and are managed by a corporate entity engaged in warehousing activities, such as the Batam Industrial Zone.

y. Other Warehousing and Storage Activities (KBLI 2020 – 52109) This classification covers other warehousing and storage activities not included in KBLI groups 52101 through 52108, including container depot operations involving storage and/or stacking of containers and which may be equipped with additional facilities.

Capital Structure and Shareholder Composition of PPG

The Capital Structure and Shareholding Composition of PPG based on the Minutes of Meeting Deed of PPG No. 287 dated 29 December 2023, drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the amendments thereto have been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System (SABH) of the Ministry of Law and Human Rights pursuant to Letter No. AHU-AH.01.03-0012934 dated 16 January 2024, are as follows:

❖ **Capital Structure**

- Authorized Capital

  Number of Shares: 884 shares (consisting of 259,000 Series A shares and 625,000 Series B shares)

  Nominal Amount: IDR 1,366,065,625,000

- Issued and Paid-up Capital

  Number of Shares: 884 shares (consisting of 259,000 Series A shares and 625,000 Series B shares)

  Nominal Amount: IDR 1,366,065,625,000

- Nominal Value

  Series A shares: Series A shares with a nominal value of IDR 1,000,000 per share

  Series B shares: Series B shares with a nominal value of IDR 1,771,305 per share

❖ **Shareholders' Composition of PPG**

Shareholders	Number of Shares (shares)	Nominal Amount (IDR)	Ownership (%)
PT Soho Global Health Tbk (Company)	883,999 shares (consisting of 258,999 Series A shares and 625,000 Series B shares)	1,366,064,625,000	99.9999
PT Universal Health Network	1 Series A share	1,000,000	0.00001

Board of Commissioners and Board of Directors Composition of PPG

Based on the Deed of Statement of Resolutions of PPG No. 174 dated 26 August 2025, the data of which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System ("SABH") of the Ministry of Law and Human Rights under its Letter No. AHU-AH.01.09-0334848 dated 8 September 2025, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT SIP as of the date of this Information Disclosure is as follows:

Board of Commissioners

Commissioner	: Eng Liang Tan

Board of Directors

President Director	: Ery Yunasri
Director	: Piero Brambati
Director	: Edwin Vega Darma
Director	: Pandy Harianto

III. SUMMARY OF FEASIBILITY STUDY OF CHANGE BUSINESS ACTIVITY

PPG has appointed Mr. Budi Prasetyo, MAPPI (Cert), an independent appraiser, who is a Public Appraiser from the Public Appraisal Services Office of Wawat Jatmika & Rekan ("**KJPP-WJR**"). The said Public Appraiser and KJPP-WJR are duly licensed and registered as appraisers with the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia under business license No. 2.15.0133 and with the Financial Services Authority under Registration Certificate (STTD) No. STTD.PB-55/PM.223/2022. The appointment was made pursuant to Engagement Letter No. P2295/BV25/012-KJPP/11-25 dated 28 November 2025 regarding the Business Feasibility Study services for PPG.

The following is a summary of the Business Feasibility Study Report on the Change and/or Addition of Business Activities of PPG as set forth in the Business Feasibility Study Report of PPG No. 00003/2.0133-00/BS/05/0603/1/I/2026 dated 14 January 2026 as further revised by Business Feasibility Study Report on the Change and/or Addition of Business Activities of PPG No. 00008/2.0133-00/BS/05/0603/1/II/2026 dated 19 February 2026("**Business Feasibility Study Report**"):

A. PURPOSE AND OBJECTIVE

The purpose and objective of this Business Feasibility Study is in relation tofPPG's plan to add two (2) Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) into the Articles of Association of PPG. This Business Feasibility Study is prepared in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 ("POJK 17") concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

B. ASSESSMENT DATE

The assessment date for the Business Feasibility Study is September 30, 2025.

C. OBJECT OF BUSINESS FEASIBILITY STUDY

The object of this business feasibility study is the plan of PPG to carry out the addition of new business activities into the Articles of Association of PPG, are as follows:

- **Internet-Based Trading Application Development Activities (E-Commerce)** (KBLI 2020 - 62012), which include the following business activities:
  Encompassing the development of internet-based trading (e-commerce) applications. Such activities include consultation, analysis, and application programming for online trading activities; and

- **Web Portal and/or Digital Platform for Commercial Purposes** (KBLI 2020 - 63122), which include the following business activities:
  Encompassing the operation of websites for commercial purposes that utilize search engines to generate and maintain large databases of internet addresses and content in an easily searchable format; the operation of websites acting as portals to the internet, such as media websites that provide regularly updated content, either directly or indirectly, for commercial purposes; the operation of digital platforms and/or websites/web portals that conduct electronic transactions in the form of business activities facilitating and/or mediating the transfer of ownership of goods and/or services and/or other services via the internet and/or electronic devices and/or other electronic system methods carried out for commercial (profit) purposes, which may include one, several, or all components of electronic transactions, namely ordering, payment, and delivery of such activities. This category also includes commercially oriented (profit-based) websites/web portals and/or digital platforms that serve as applications for facilitating and/or mediating electronic transaction services, such as merchant aggregators (marketplaces), digital advertising, and on-demand online services.

D. FINANCIAL PROJECTION ANALYSIS

FINANCIAL PROJECTIONS WITH AND WITHOUT ADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES

The following is a projection of PPG's Financial Position Statement with and without additional business activities from December 31, 2025, to 2030.

Keterangan	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aset						
Aset lancar						
Kas dan setara kas	931.676	1.063.330	1.288.917	1.619.931	2.056.024	2.608.041
Piutang usaha - pihak ketiga	1.979.545	2.118.113	2.298.153	2.493.496	2.692.975	2.908.413
Piutang lain-lain						
Pihak ketiga	334.607	368.067	404.874	445.361	489.897	538.887
Pihak berelasi	130.273	136.786	143.625	150.807	158.347	166.264
Persediaan	1.568.764	1.670.733	1.799.380	1.937.932	2.081.339	2.235.358
Pajak dibayar dimuka	461.837	480.311	499.523	519.504	540.284	561.896
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1.613	1.776	1.953	2.149	2.364	2.600
Jumlah aset lancar	5.408.315	5.839.116	6.436.425	7.169.180	8.021.230	9.021.459

Keterangan	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aset tidak lancar						
Uang muka pembelian aset tetap	1.084	1.192	1.311	1.443	1.587	1.745
Uang muka aset hak guna	8.624	9.487	10.435	11.479	12.627	13.890
Aset tetap, neto	216.456	209.095	200.189	191.166	183.681	182.162
Aset hak guna, neto	50.644	29.809	8.974	-	-	-
Aset pajak tangguhan, neto	35.458	39.004	42.904	47.195	51.914	57.105
Aset takberwujud, neto	1.141	3.522	5.025	5.894	6.042	6.194
Aset tidak lancar lainnya	2.823	3.105	3.417	3.758	4.133	4.547
Aset keuangan tidak lancar lainnya	3.869	3.869	3.869	3.867	3.869	3.869
Jumlah aset tidak lancar	320.099	299.083	276.124	264.802	263.853	269.512
Jumlah aset	5.728.414	6.138.199	6.712.549	7.433.982	8.285.083	9.290.971

Keterangan	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Liabilitas dan Ekuitas						
Liabilitas						
Liabilitas jangka pendek						
Utang usaha - pihak ketiga	2.946.025	3.137.517	3.379.105	3.639.296	3.908.604	4.197.841
Utang lain-lain						
Pihak ketiga	72.353	79.589	87.548	96.302	105.933	116.526
Pihak berelasi	1.178	-	-	-	-	-
Utang pajak	934	1.027	1.130	1.243	1.367	1.504
Beban akrual	26.128	27.434	28.806	30.246	31.758	33.346
Liabilitas imbalan kerja karyawan - jangka pendek	8.227	9.050	9.955	10.951	12.046	13.251
Liabilitas sewa - jangka pendek	10.022	11.024	12.126	13.339	14.673	16.140
Jumlah liabilitas jangka pendek	3.064.867	3.265.641	3.518.670	3.791.377	4.074.381	4.378.608
Liabilitas jangka panjang						
Liabilitas sewa - jangka panjang	4.936	5.430	5.973	6.571	7.228	7.951
Liabilitas imbalan kerja karyawan	93.953	103.348	113.684	125.052	137.557	151.311
Jumlah liabilitas jangka panjang	98.889	108.778	119.657	131.623	144.785	159.262
Jumlah liabilitas	3.163.756	3.374.419	3.638.327	3.923.000	4.219.166	4.537.870

The following is a projection of PPG's Profit and Loss Report without and with additional business activities from December 31, 2025 to 2030.

Keterangan	Okt-Des 2025	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	2.815.011	10.791.369	11.546.764	12.528.239	13.593.140	14.680.591	15.855.038
Beban pokok penjualan	(2.442.386)	(9.747.924)	(10.381.996)	(11.181.410)	(12.042.378)	(12.933.514)	(13.890.594)
Laba kotor	372.625	1.043.445	1.164.768	1.346.829	1.550.762	1.747.077	1.964.444
Beban penjualan	(141.204)	(484.613)	(557.305)	(595.202)	(635.676)	(678.901)	(725.067)
Beban umum dan administrasi	(12.815)	(29.723)	(34.181)	(35.754)	(37.398)	(39.119)	(40.918)
Pendapatan lainnya	(195)	3.635	3.817	4.007	4.208	4.418	4.639
Beban lainnya	(4.910)	(17.993)	(18.893)	(19.837)	(20.829)	(21.871)	(22.964)
Laba operasi	213.501	514.751	558.206	700.043	861.067	1.011.604	1.180.134
Pendapatan keuangan	4.318	18.178	19.087	20.041	21.043	22.095	23.200
Beban keuangan	(1.326)	(1.424)	(1.495)	(1.570)	(1.648)	(1.731)	(1.817)
Laba sebelum pajak penghasilan badan	216.493	531.505	575.798	718.514	880.462	1.031.968	1.201.517
Beban pajak penghasilan badan	(48.946)	(116.931)	(126.676)	(158.073)	(193.701)	(227.033)	(264.334)
Laba bersih	167.547	414.574	449.122	560.441	686.761	804.935	937.183

Profitability Ratio

Keterangan	Okt-Des 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Imbal Balik Aset	n.r	7,16%	7,32%	8,35%	9,24%	9,72%	10,09%
Imbal Balik Ekuitas	n.r	16,00%	16,25%	18,23%	19,56%	19,80%	19,72%
Marjin Laba Kotor	13,24%	9,67%	10,09%	10,75%	11,41%	11,90%	12,39%
Marjin Laba Usaha	7,58%	4,77%	4,83%	5,59%	6,33%	6,89%	7,44%
Marjin Laba Bersih	5,95%	3,84%	3,89%	4,47%	5,05%	5,48%	5,91%

Throughout the projection period, all profitability ratios, both with and without additional business activities, have consistently increased annually. The upward trend in profitability ratios demonstrates PPG's sound financial management.

Liquidity Ratio

Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio Kas	0,30	0,33	0,37	0,43	0,50	0,60
Rasio Cepat	1,76	1,79	1,83	1,89	1,97	2,06
Rasio Lancar	1,25	1,28	1,32	1,38	1,46	1,55

During the projection period, all liquidity ratios, both with and without additional business activities, continued to increase annually.

Activity Ratio

Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perputaran Piutang Usaha	67	67	67	67	67	67
Perputaran Persediaan	59	59	59	59	59	59
Perputaran Utang Usaha	110	110	110	111	110	110

Activity ratio during the projection period without and with the addition of stable business activities

E. ASSUMPTIONS AND LIMITING CONDITIONS

Business Feasibility Study Assumptions

a) The resulting Business Feasibility Study Report constitutes a **non-disclaimer opinion**.

b) The Business Feasibility Study has been prepared based on the principles of integrity of information and data. In carrying out this engagement, KJPP-WJR rely upon and base our work on the accuracy, reliability, and completeness of all financial information and other information provided by PPG or otherwise available to the public, which is fundamentally true, complete, and not misleading.

c) KJPP_WJR assume that all information and data provided by PPG in connection with this engagement are true, complete, and reliable, and that there is no undisclosed information that would affect this assessment.

Limiting Conditions

a) The Business Feasibility Study must be considered as a whole, and the use of any part of the analysis and information without taking into account the entire information and analysis may result in a misleading view of the underlying process on which the

opinion is based. The preparation of this Business Feasibility Study constitutes a complex process and may not be adequately performed through incomplete analysis.

b) The Business Feasibility Study has been prepared based on the prevailing general financial, monetary, regulatory, and market conditions existing at the time this report is issued.

c) The Business Feasibility Study utilizes financial projections prepared by management, the reasonableness of which has been reviewed by KJPP-WJR. Management remains fully responsible for the achievement of such financial projections and for the future financial performance of PPG.

d) KJPP-WJR are responsible for the business feasibility opinion.

e) KJPP-WJR are responsible for the execution of the valuation and for assessing the reasonableness of the adjusted financial projections.

f) KJPP-WJR have not conducted any investigation or evaluation regarding the legal validity of the Business Feasibility Study Object nor its taxation implications; therefore, we express no opinion on the legal and tax impacts of this Business Feasibility Study. The services KJPP-WJR provide to PPG in connection with this engagement are limited solely to the provision of a business feasibility opinion and do not constitute accounting, audit, or tax services.

g) KJPP-WJR state that KJPP-WJR's engagement does not include the analysis of business activities outside the scope of the Business Feasibility Study Object that may be available to PPG, nor the impact of such business activities on PPG, and does not constitute an analysis of the highest and best use of the Business Feasibility Study Object.

h) KJPP-WJR work in relation to this Transaction Plan does not constitute and shall not be construed in any form as a review or audit or the performance of any specific procedures on financial information. Such work is also not intended to disclose weaknesses in internal controls, errors, or irregularities in the financial statements, or violations of law.

i) KJPP-WJR's engagement also does not include the provision of testimony before any court, tax authority, or other institution.

j) The Business Feasibility Study Report is open to the public, except for information of a confidential nature that may affect the Company's operations.

k) In preparing the Business Feasibility Study Report, KJPP-WJR has acted independently, free from any conflict of interest, and is not affiliated with the Company or any parties affiliated with the Company. KJPP-WJR also has no interest or personal benefit in connection with this engagement.

F. APPROACHES AND METHODS FOR PREPARING BUSINESS FEASIBILITY STUDY REPORTS

a) The approach used in analyzing the feasibility of the addition of PPG's Business Activities is conducted through an assessment of market feasibility, business model feasibility, management model feasibility, and financial feasibility.

b) Based on the market feasibility assessment, the addition of the KBLI does not result in any changes to the Company's market share, market potential, or market value

potential, as the addition of the KBLI is solely related to aligning the Company's KBLI classification with the business activities that have been carried out to date..

c) Based on the business model feasibility assessment, it is indicated that the addition of the business activity does not result in any changes to the Company's business model, as the planned addition of the KBLI is intended only to adjust the legal classification of the KBLI currently held by the Company to correspond with the business activities that have been conducted to date. Accordingly, the addition of the KBLI does not give rise to any changes in the Company's future operational activities.

d) Based on the management model feasibility assessment, it is indicated that the addition of the business activity does not result in any changes to the Company's management model, as the planned addition of the KBLI is intended solely as a legal alignment of the KBLI currently held by the Company with the business activities that have been carried out to date. Accordingly, the addition of the KBLI does not give rise to any changes in the Company's future operational activities.

e) In the financial feasibility assessment, there are no financial impacts or quantitative benefits arising from the addition of the KBLI, as the planned addition of the KBLI is solely intended to align the legal classification of the KBLI currently held by the Company with the business activities that have been conducted to date. Accordingly, the addition of the KBLI does not result in any changes to the Company's operational activities or its future financial performance.

The following analysis is based on PPG's Audited Financial Report as of and for the years ending December 31, 2020 to 2024 and PPG's interim Audited Financial Report for the 9 (nine) month period ending September 30, 2025.

Dalam jutaan Rupiah	31 Desember					30 September 2025
Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain						
Penjualan	5.985.679	6.892.595	7.123.417	8.147.337	10.085.391	7.976.357
Laba Kotor	627.600	724.782	677.837	798.137	888.832	670.820
Laba Usaha	204.582	324.161	276.513	364.546	405.248	301.250
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	203.701	332.319	282.374	375.952	420.479	315.011
Laba Bersih	148.969	263.902	223.333	301.330	329.323	247.027
Laba Komprehensif	145.295	265.946	231.954	300.746	332.569	242.693

Sumber: Laporan Keuangan Auditan PPG 31 Desember 2020-2024 dan Laporan Keuangan Auditan Interim PPG per 30 September 2025

Dalam jutaan Rupiah	31 Desember					30 September 2025
Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024	
Laporan Posisi Keuangan						
Aset lancar	3.082.869	2.923.608	3.471.228	4.246.837	4.823.797	5.397.707
Aset tidak lancar	326.344	310.468	300.355	310.521	322.075	318.999
Jumlah Aset	3.409.213	3.234.076	3.771.583	4.557.358	5.145.872	5.716.706
Liabilitas jangka pendek	1.804.222	1.485.456	1.901.028	2.317.388	2.673.482	3.224.986
Liabilitas jangka panjang	106.013	93.696	84.024	87.947	89.900	94.610
Jumlah Liabilitas	1.910.235	1.579.152	1.985.052	2.405.335	2.763.382	3.319.596
Jumlah Ekuitas	1.498.978	1.654.924	1.786.531	2.152.023	2.382.490	2.397.110
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.409.213	3.234.076	3.771.583	4.557.358	5.145.872	5.716.706

Sumber: Laporan Keuangan Auditan PPG 31 Desember 2020-2024 dan Laporan Keuangan Auditan Interim PPG per 30 September 2025

Dalam jutaan Rupiah	31 Desember					30 September 2025
Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024	
Laporan Posisi Keuangan						
Aset lancar	3.082.869	2.923.608	3.471.228	4.246.837	4.823.797	5.397.707
Aset tidak lancar	326.344	310.468	300.355	310.521	322.075	318.999
Jumlah Aset	3.409.213	3.234.076	3.771.583	4.557.358	5.145.872	5.716.706
Liabilitas jangka pendek	1.804.222	1.485.456	1.901.028	2.317.388	2.673.482	3.224.986
Liabilitas jangka panjang	106.013	93.696	84.024	87.947	89.900	94.610
Jumlah Liabilitas	1.910.235	1.579.152	1.985.052	2.405.335	2.763.382	3.319.596
Jumlah Ekuitas	1.498.978	1.654.924	1.786.531	2.152.023	2.382.490	2.397.110
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.409.213	3.234.076	3.771.583	4.557.358	5.145.872	5.716.706

Sumber: Laporan Keuangan Auditan PPG 31 Desember 2020-2024 dan Laporan Keuangan Auditan Interim PPG per 30 September 2025

Dalam jutaan Rupiah	31 Desember					30 September 2025
Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024	
Marjin Laba Kotor	10,49%	10,52%	9,52%	9,80%	8,81%	8,41%
Marjin Laba Usaha	3,42%	4,70%	3,88%	4,47%	4,02%	3,78%
Marjin Laba Bersih	2,49%	3,83%	3,14%	3,70%	3,27%	3,10%
Imbalan Balik Aset	4,37%	8,16%	5,92%	6,61%	6,40%	4,32%
Imbalan Balik Ekuitas	9,94%	15,95%	12,50%	14,00%	13,82%	10,31%
Rasio Lancar	1,71	1,97	1,83	1,83	1,80	1,67
Rasio Cepat	1,20	1,26	1,22	1,20	1,20	1,20

Revenue and Gross Profit Margin

- PPG's revenue from 2020 to September 30, 2025, consistently increased annually, with the largest increase occurring in 2024, reaching 23.79% compared to the previous year.
- The increase in revenue was primarily driven by increased sales volume for core products, expanded distribution networks, and a more aggressive marketing strategy.
- PPG's gross profit margin also tended to be stable, averaging 9.6% from 2020 to September 30, 2025. This suggests the company's ability to maintain production cost efficiency and stable selling prices amidst revenue growth, despite pressure on margins in the past two years, which requires further monitoring of the cost of goods sold structure.

Net Profit and Net Profit Margin

- PPG's net profit growth from 2020 to September 30, 2025, tended to increase annually, except in 2022, when it decreased by 15.37% compared to the previous year.
- The decrease in net profit in 2022 was due to a decrease in gross profit and an increase in the company's operating expenses.
- PPG's net profit margin tended to be stable from 2020 to September 30, 2025, averaging 3.25% annually. A stable net profit margin indicates that the company has efficient operational cost management in maintaining final profitability, despite fluctuations in gross profit and operating expenses over time.

Total Assets

- PPG's total assets from 2021 to September 30, 2025, tended to increase annually, with the highest increase occurring in 2023, at 20.83% compared to the previous year.
- The increase in PPG's total assets in 2023 was due to an increase in third-party accounts receivable, which increased by 22.22% compared to the previous year, and an increase in other non-current financial assets of IDR 201 billion.

Total Liabilities

- In line with the increase in assets, PPG's total liabilities from 2021 to September 30, 2025, also increased annually, with the largest increase occurring in 2022, at 25.7% compared to the previous year.
- The increase in total liabilities in 2022 was largely due to an increase in accounts payable to third parties and related parties. In total, accounts payable increased by 31.93% compared to the previous year.

Total Equity

- PPG's total equity has consistently increased annually from 2020 to September 30, 2025, due to the company's success in recording profits each year. Furthermore, the company has been able to routinely distribute dividends to shareholders, starting in 2021.

Accounts Receivables and Accounts Payable Turnover

- PPG's accounts receivable turnover from 2020 to September 30, 2025, tended to be stable, with the longest period occurring on September 30, 2025, at 73 days, and the shortest period occurring in 2021, at 47 days.
- In line with accounts receivable, PPG's accounts payable turnover from 2020 to September 30, 2025 also tends to be stable with the longest occurring in 2020 and September 30, 2025 for 116 days and the fastest in 2021 for 81 days.

G. CONCLUSION

Based on the foregoing, we are of the opinion that the proposed Change and/or Addition of Business Activities of **PT Parit Padang Global** is **"FEASIBLE."**

IV. AVAILABILITY OF EXPERTS IS RELATED TO ADDITION OF BUSINESS ACTIVITIES

In relation to the addition of business KBLI, PPG does not have a dedicated IT team; however, the applications used will receive full support from the IT team within the organizational structure of SGH Group.

V. EXPLANATIONS, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR IMPLEMENTING THE ADDITION OF BUSINESS ACTIVITIES

The addition of business activities is carried out as part of an adjustment and alignment of PPG's business activity classifications to ensure consistency with business activities that have been and/or are currently being carried out in practice. Such addition of business activities is not intended to change the core business characteristics, business model, management model, or market segments of PPG, but rather to ensure consistency between PPG's business activities and the applicable licensing requirements and Articles of Association.

a) Alignment of KBLI classification with existing business activities

The addition of 2 (two) KBLI classifications is undertaken to align PPG's business activity classifications with business activities that have been carried out to date, so as to avoid any inconsistency between PPG's actual business activities and the KBLI classifications set forth in its Articles of Association.

b) No change to PPG's market share and business potential

Based on the Business Feasibility Study, the addition of the KBLI classifications does not result in any change to PPG's market share, market potential, or market value potential, as such addition constitutes solely a legal classification adjustment and does not alter the scope of PPG's business activities.

c) No change to the business model and management model

The addition of business activities does not result in any change to PPG's business model or management model, as it is not accompanied by any changes to operational processes, organizational structure, or business management systems.

d) No change to PPG's future operational activities

In line with the Business Feasibility Study, the addition of the KBLI classifications does not give rise to any changes to PPG's operational activities going forward, as the business activities concerned have been carried out previously.

The permits required to carry out this business activity are the KBLIs listed in the PPG Business Identification Number, followed by the process of fulfilling the requirements for each KBLI.

Based on the foregoing considerations, the Board of Directors of PPG is of the opinion that the plan to change and/or add business activities constitutes a reasonable and rational step and does not alter PPG's operational activities or business characteristics.

e) Other Material Matters

The digital product subject of this feasibility study is the PPG Online System (PPGOS), an application platform owned by PPG. PPGOS functions as a digital interface between the company and its business partners/customers, including features for product ordering, transaction status monitoring, and digital information services.

There are no calculations related to the feasibility of financial investments because there are no investments made by shareholders in the form of additional capital contributions or capital expenditures. This additional business activity is solely to align the legality of the Company's KBLI (Indonesian Business Identification Number) to align with its business activities.

VI. EXPLANATION OF THE EFFECT OF ADDITION IN BUSINESS ACTIVITIES ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

Business activities related to the provision of digital platforms do not require new capital expenditures. All costs related to system development, platform maintenance, operational management, and workforce support for marketing and sales activities are fully funded through the Company's working capital. Therefore, there is no need for additional assets or material long-term investments.

Due to the asset-light and flexible nature of these business activities, business performance evaluations will be conducted in stages following the Company's operational developments and revenue realization. Overall, these new business activities do not have a material negative impact on PPG's financial condition.

The addition of these business activities does not impact PPG's finances or PPG's shareholders, as the planned addition of the KBLI is solely to adjust the legality of PPG's existing KBLI to align with its existing business activities. Therefore, the addition of the KBLI does not result in any changes to the Company's operational activities or its future financial performance.

VII. INFORMATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company will convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") with the following implementation schedule:

No	Activity	Date
1	Announcement of the AGMS to Shareholders	15 Januari 2026
2	Deadline for the submission of agenda proposals for the AGMS by Shareholders	At the latest on 23 January 2026
3	Recording Date (for Shareholders who are eligible to attend the AGMS)	29 January 2026
4	Summon/Notice of the AGMS to Shareholders	30 January 2026
5	Conducting the AGMS	23 February 2026
6	Announcement of Summary Minutes of the AGMS	23 February 2026
7	Submission of the AGMS Minutes	At the latest on 25 March 2026

The agenda items to be proposed in relation to the Transaction plan are as follows:

1. Discussion of the Feasibility Study on the Change and/or Addition of the Company's Business Activities, for the purpose of fulfilling the requirements and provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in

Business Activities.

2. Approval of the Plan for the Change and/or Addition of the Company's Business Activities.
3. Discussion of the Feasibility Study on the Change and/or Addition of Business Activities of the Company's Controlled Entity, namely PT Parit Padang Global, for the purpose of fulfilling the requirements and provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.
4. Approval of the Planned Changes and/or Additions to the Business Activities of the Controlled Company, namely PT Parit Padang Global
5. Discussion of the Feasibility Study on the Change and/or Addition of Business Activities of the Company's Controlled Entity, namely PT Soho Industri Pharmasi,for the purpose of fulfilling the requirements and provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.
6. Approval of the Planned Changes and/or Additions to the Business Activities of the Controlled Company, namely PT Soho Industri Pharmasi
7. Approval of the Reappointment/Changes to the Composition of the Board of Commissioners of the Company.

The announcement, notice of meeting, and publication of the summary minutes in relation to the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") will be delivered by the Company through: (i) the Integrated Electronic Reporting System for Issuers and Public Companies of the IDX and the Financial Services Authority (OJK), (ii) the Company's official website, and (iii) the KSEI Electronic General Meeting System Application (eASY.KSEI), in accordance with the above schedule and in compliance with the applicable regulations.

Attendance Quorum and Decision Quorum

The GMS will be held in accordance with Article 42 of POJK No. 15/2020. A GMS may be held to discuss the agenda item if:

1. First GMS

A GMS may be held if attended by shareholders or their proxies representing more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights.

GMS decisions are valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights present at the GMS.

2. Second GMS

If the attendance quorum for the first GMS as referred to in paragraph (1) is not achieved, a second GMS may be held, provided that the second GMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders or their proxies representing at least 3/5 (three-fifths) of the total shares with valid voting rights.

The resolution of the second GMS is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present.

3. Third GMS

If the attendance quorum for the second GMS as referred to above is not reached, a third GMS may be held, provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders of shares with valid voting rights within the attendance quorum and decision quorum determined by the OJK upon the Company's request.

In the event that changes to Business Activities do not obtain approval from the GMS, the Company will request approval from the GMS again no later than 12 months after the GMS that did not approve the changes to Business Activities.

In connection with the addition of KBLI which results in changes to Article 3 of the Articles of Association regarding the aims and objectives and business activities of the Company, these changes constitute changes to the Articles of Association which require approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

VIII. MISCELLANEOUS

a. Objections from parties regarding the planned changes and/or additions to business activities by the Company and/or Subsidiaries

As of the date of issuance of this Additional Disclosure of Information, the Company has not received any objections from any parties regarding the planned changes and/or additions to business activities by the Company.

b. Approvals and/or permits and/or notifications from the government, other agencies, institutions, or other third parties that the Company and/or Subsidiaries must fulfill in addition to the obligations stipulated in POJK No. 17/POJK.04/2020 regarding Changes and/or Addition to Business Activities

After obtaining approval from the General Meeting of Shareholders regarding the Changes and/or Addition to Business Activities, the Company will add the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) to the Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS) system.

Furthermore, the Company is not required to apply for additional permits related to conducting electronic commerce, as the Company does not provide and/or operate its own electronic platform, but rather only conducts retail sales activities through third-party e-commerce platforms.

IX. ADDITIONAL INFORMATION

The Shareholders who require additional information in connection with this Supplemental Disclosure of Information, may contact the Company at the following address:

PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
Attn: Corporate Secretary
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930, Indonesia
Phone: +62 21 4683 2588
Facsimile: +62 21 4683 2589
Email address: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Website: www.sohoglobalhealth.com